

2020

PERUBAHAN RENJA

Perubahan Rencana Kerja



**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KABUPATEN MOJOKERTO**

(0321) 322817 | www.bkpp.mojokertokab.go.id | Jl. A. Yani 16 Mojokerto

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Kata Pengantar.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	39
3.3 Program dan Kegiatan Renja PD	40
BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	48
BAB V PENUTUP	53

KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Pembangunan yang direncanakan secara baik berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah disusun melalui mekanisme dan dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang disusun oleh Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dan penjabaran atas dokumen perencanaan daerah lima tahun.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan memberikan gambaran tentang kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2020, yang merupakan pedoman pelaksanaan diharapkan dapat memberikan arah dan tujuan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selaku Perangkat Daerah dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Demikian semoga tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat terwujud sesuai dengan harapan kita semua.

Mojokerto, 24 Agustus 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KAB. MOJOKERTO



Drs. Ec. SUSANTOSO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620317 198603 1 014

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah APBD dan perubahan PAPBD. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun kedepan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang penyusunannya mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto di bentuk sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam bidang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menciptakan aparat yang profesional yaitu berkompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, netral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berwawasan kesatuan dan kebangsaan sehingga dapat melayani masyarakat dan dunia usaha.

Sebagai dokumen perencanaan, Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto memuat kebijakan, program kerja prioritas, kegiatan pembangunan beserta pendanaannya sehingga tercipta keselarasan dalam rangka pembangunan Daerah. Perubahan Rencana kerja (Renja) yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi organisasi disusun berdasarkan prinsip-prinsip :

1. Mengacu pada rancangan awal Perubahan RKPD tahun yang bersangkutan, yang digunakan untuk merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif;
2. Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penetapan tujuan, sasaran kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju tahun berikutnya;
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagai landasan perumusan kegiatan alternative untuk mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;
4. Sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah serta dapat menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 adalah:

1. Undang – undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
11. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto;
12. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2020.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Merupakan arah dan pedoman/acuan dalam penyelenggaraan pembangunan SDM Aparatur dalam jangka 4 (empat) bulan kedepan di tahun 2020;
2. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pembangunan SDM Aparatur;

3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada tahun anggaran 2020

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN;

Pada bagian ini di jelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja PD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Perubahan Renja BKPP serta tindak lanjut proses penyusunan Rancangan PAPBD

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal P-RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal P-RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal P-RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal P-RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal P-RKPD

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.

Sajian Tabel TC-32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

Bab IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2020.

Bab V P E N U T U P

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 secara umum selaras dengan Perubahan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 yang dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai 6 program dan beberapa kegiatan di dalamnya.

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal P-RKPD Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal P-RKPD Kabupaten Mojokerto, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam :“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah”

Program dan Kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (Renja) BKPP Kabupaten Mojokerto tahun 2020 terdapat 2 (dua) kegiatan baru untuk kelancaran tugas BKPP Kabupaten Mojokerto dan sudah terakomodir di dalam SIMDA Keuangan dapat diuraikan antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, mencakup kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - Rapat-Rapat dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah; dan
 - Penyediaan Jasa Tenaga Kerja.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didalamnya mencakup kegiatan:
- Pengadaan Mebeleur;
 - Pengadaan Kendaraan dinas/operasional;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan didalamnya mencakup kegiatan:
- Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD.
4. Program Pengembangan ASN didalamnya mencakup kegiatan:
- Peningkatan Kompetensi ASN;
 - Pelatihan Dasar/Prajabatan ASN;
 - Perencanaan dan Pengadaan ASN;
 - Pengembangan Karier ASN.
5. Program Penataan ASN yang di dalamnya mencakup kegiatan :
- Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
 - Pelaksanaan Mutasi Jabatan ASN.
6. Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian, mencakup kegiatan:
- Peningkatan Kinerja ASN;
 - Evaluasi Manajemen ASN;
 - Pembinaan ASN;
 - Pengelolaan Sistem Informasi Pegawai ASN;
 - Rekonsiliasi Data ASN;
 - Pengelolaan Dokumen Kepegawaian ASN.

Sedangkan untuk capaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2019 pada umumnya baik karena ada efisiensi anggaran yang terbukti dari total anggaran belanja langsung APBD TA 2019 sebesar Rp. 10.916.150.880 terealisasi sebesar Rp. 7.549.304.870 atau terserap 69%, untuk kinerja anggaran belum memenuhi target dari

yang ditentukan sebesar 91% hal ini dikarenakan ada 2 (dua) kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yaitu Pengadaan CPNS Formasi 2019 dan Pengadaan PPPK. Adapun capaian program dan kegiatan tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kompetensi ASN

Pencapaian target kinerja tahun 2019 atas sasaran ini adalah :

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Sasaran	2019		Capaian Program	Anggaran	Realisasi
				Target	Realisasi			
I.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Pendidikan dan Kedinasan/	Meningkatnya Kompetensi ASN	- Presentase ASN yang memenuhi syarat jabatan	84%	84,07%	100,08 %	7.726.689.000	5.423.188.355
			- Persentase ASN yang berkinerja baik	99,03%	99,62%	100,59%	1.550.225.000	1 397 556 257

Berdasarkan tabel diatas tersebut, Pada **indikator ini** berdasarkan hasil analisa kesenjangan jabatan, penataan PNS di Kabupaten Mojokerto pada tahun anggaran 2019 berdasarkan syarat jabatan (Pendidikan Formal, Diklat dalam jabatan, keahlian, keterampilan dengan pengalaman kerja) dengan target 84% terealisasi sebesar 84,07% sehingga target yang telah ditetapkan tercapai dengan persentase capaian kinerja menjadi sebesar 100,08% sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ada efisien anggaran.

Rekapitu Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah dapat di uraikan sebagai berikut :

Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2020
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama Perangkat Daerah : **BADAN KEPEGAWAIN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan (Bulan Juni)					
					Target Renja SKPD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2020 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
4	05				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian									
04	05	06			Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan									
04	05	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50%	
04	05	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	6 Bulan	50
04	05	06	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan / perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit	0 unit	0
04	05	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	6 Bulan	50
04	05	06	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	6 Bulan	50

04	05	06	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	6 Bulan	50
04	05	06	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan mamin tamu dan rapat yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	6 Bulan	50
04	05	06	01	21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah waktu penyediaan perjalanan dinas yang dibutuhkan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	6 Bulan	50
04	05	06	01	23	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	Jumlah Penyediaan jasa dan tenaga kerja yang dibutuhkan selama 12 bulan	6 THL	6 THL	6 THL	6 THL	100	6 THL	6 THL	100
04	05	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	100 %	0 %						
04	05	06	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas operasional roda empat	1 unit	-	-	-	-	1 unit	0	0
04	05	06	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis meubel yang tersedia	4 unit	-	-	-	-	4 unit	0	0
04	05	06	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung yang dilakukan	3 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100	1 gedung	0	0
04	05	06	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional yang di lakukan	6 Unit	4 Unit	6 unit	4 unit	67	6 Unit	4 unit	67
04	05	06	02	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang di lakukan	6 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	6 Jenis	4 Jenis	67
04	05	06	02	29	Pemeliharaanann Rutin Gedung Balai Diklat	Jumlah Pemeliharaan Gedung Balai Diklat yang dilakukan	3 gedung	-	3 gedung	3 gedung	100	0	0	100
04	05	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentas pegawai dengan tingkat kedisiplinan kedinasn sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %

04	05	06	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	38 stel	1 kali	38 stel	38 stel	100	0	0	100
04	05	06	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja organisasi yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	71%	71%
04	05	06	06	05	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja OPD yang dihasilkan	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	7 dokumen	5 dokumen	71
04	05	06	28		Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan lulus dengan predikat baik	100 %	99 %	100 %	100 %	100 %	-	-	89%
04	05	06	28	01	Pengiriman Peserta Diklat Teknis Fungsional	Jumlah Peserta Diklat yang dikirim	200 orang	155 orang	45 orang	45 orang	100	-	-	100
04	05	06	28	02	Diklat Kepemimpinan	Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatannya	200 orang	135 orang	45 orang	45 orang	100	-	-	90
04	05	06	28	03	Diklat Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti prajabatan	200 orang	50 orang	150 orang	140 orang	93	-	-	95
04	05	06	28	04	Diklat Teknis Struktural/Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti diklat sesuai dengan hasil analisa kebutuhan diklat	2500 orang	839 Orang	1661 orang	1661 orang	100	-	-	100
04	05	06	28	07	Pengelolaan Administrasi Ijin Belajar	Jumlah ASN yang mengajukan ijin belajar	450 orang	163 orang	100 orang	161 orang	161	-	-	72
04	05	06	28	05	Penyelenggaraan Ujian Dinas	Jumlah peserta yang ikut Ujian Dinas	14 orang	-	14 orang	14 orang	100	-	-	100
04	05	06	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan formasi kebutuhan dan syarat jabatan	81 %	83,72 %	82 %	83,94 %	102,36	-	-	99,38 %

04	05	06	30	04	Pemeliharaan SIMPEG	Jumlah Aplikasi yang terawat / terpelihara	3 aplikasi	3 aplikasi	-	-	-	-	-	100
04	05	06	30	09	Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian	Jumlah buku profil dan informasi kepegawaian	Buku profil 300, DUK 12, Bezetting 12	300 buku profil, Duk : 12, Bezetting : 12	-	-	-	-	-	100
04	05	06	30	09	Penataan dan Pemeliharaan Arsip perorangan PNS	Jumlah file PNS yang terpelihara	8118 PNS	8434 orang	-	-	-	-	-	103
04	05	06	30	07	Pengembangan SIMPEG	Jumlah Aplikasi yang di kembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	-	-	-	100
04	05	06	30	09	Pelayanan dan Pengolahan Data PNS	Jumlah identitas pegawai yang diterbitkan	1495 PNS	1495 PNS	-	-	-	-	-	100
04	05	06	30	01	Peningkatan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah berkas kepegawaian (Kenaikan pangkat, pension, dll) ASN yang di kelola	2850 berkas	3100 berkas	-	-	-	-	-	108
04	05	06	30	08	Penyusunan Formasi ASN	Jumlah dokumen penyusunan Formasi ASN yang tersusun	302 pengelola kepegawaian	302 pengelola kepegawaian	-	-	-	-	-	100
04	05	06	30	05	Penyusunan Program Pengembangan Pegawai	Jumlah dokumen program pengembangan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	100
04	05	06	30	10	Pengadaan CPNS ASN	Jumlah CPNS yang di terima	179 orang	175 orang	-	-	-	-	-	98
04	05	06	30	07	Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural	Jumlah pejabat yang di mutasi	480 PNS	672 PNS	-	-	-	-	-	140
04	05	06	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase peningkatan capaian penilaian prestasi kinerja ASN dengan nilai baik	99,01 %	99,04 %	99,02 %	99,59 %	100.57	-	-	0
04	05	06	30	13	Pengujian Kesehatan Bagi PNS	Jumlah PNS yang mengikuti general check up bagi pejabat struktural / PNS	739 orang	379 orang	360 orang	360 orang	100	-	-	100

04	05	06	30	18	Pemberian Penghargaan PNS	Jumlah PNS yang menerima penganugerahan Satyalancana Karya Satya	350 orang	151 orang	150 orang	142 orang	95	-	-	84
04	05	06	30	36	Pengelolaan Administrasi Penilaian Kerja PNS	Jumlah ASN yang melaporkan penilaian prestasi kerjanya tepat waktu	16509 ASN	8183 ASN	8326 ASN	8326 ASN	100	-	-	100
04	05	06	30	52	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai ASN yang lebih terukur dan memiliki kredibilitas dan realibilitas ketersediaan data	82	-	81	72,6	90	-	-	88
04	05	06	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS	99 %	33,33 %	33,33 %	33,33 %	100	-	-	0
04	05	06	30	06	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen Monitoring evaluasi dan pelaporan	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	100
04	05	06	30	10	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Jumlah PNS yang wajib lapor LP2P	13989 PNS	7900 blanko	6089 PNS	5676 PNS	93	-	-	97
04	05	06	30	14	Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	Terlaksananya pembuatan LHKPN oleh penyelenggara negara	605 WL	135 WL	500 orang	115 WL	23	-	-	41
					Pelaksanaan Sumpah PNS	Jumlah PNS yang mengikuti sumpah	239 PNS	60 PNS	179 PNS	0	0	-	-	25
04	05	06	30	21	Revolusi Mental ASN	Jumlah peserta yang ikut pembinaan	500 peserta	225 orang	120 peserta	120 peserta	100	-	-	69
04	05	06	30	29	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Presensi Berbasis Finger Print On Line	Jumlah aplikasi dan jaringan Mesin Finger Print	1 aplikasi (492 node jaringan)	1 aplikasi	1 aplikasi (492 node jaringan)	1 aplikasi (492 node jaringan)	100	-	-	100
04	05	06	30	45	Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin yang di selesaikan	42 PNS	33 PNS	9 PNS	10 PNS	111	-	-	102
04	05	06	30	46	Penyelesaian Kasus Rumah Tangga	Jumlah Kasus rumah tangga PNS yang di selesaikan	58 PNS	43 PNS	15 PNS	23 PNS	153	-	-	113

04	05	06	30	47	Peningkatan Disiplin Pegawai	Persentase tingkat kehadiran PNS	84 %	120 SKPD	84 %	100 %	100	-	-	119
04	05	06	30	48	Pembinaan dan Evaluasi Manajemen Kepegawaian	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan dan Evaluasi Manajemen Kepegawaian	207 peserta	94 peserta	113 peserta	104 peserta	92	-	-	96
04	05	06	31		Program penatausahaan ASN	Persentase ASN yang menduduki Jabatan sesuai dengan formasi kebutuhan dan syarat jabatan	84 %	-	-	-	-	84 %	83,48 %	99,38%
04	05	06	31	01	Peningkatan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah berkas kepegawaian (Kenaikan pangkat, pension, dll) ASN yang di kelola	1755 berkas	-	1755 berkas	1894 berkas	108	-	-	108
04	05	06	31	02	Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural	Jumlah ASN yang di mutasi	715 PNS	-	715 PNS	976 PNS	136	-	-	136
04	05	06	31	03	Pelayanan dan Pengolahan Data PNS	Jumlah identitas pegawai yang diterbitkan	300 PNS	-	300 PNS	417 PNS	139	-	-	139
04	05	06	31	04	Pemeliharaan SIMPEG	Jumlah Aplikasi yang terawat / terpelihara	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100	-	-	100
04	05	06	31	05	Penyusunan Program Pengembangan Pegawai	Jumlah dokumen program pengembangan yang tersusun	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	100
04	05	06	31	06	Penataan dan Pemeliharaan Arsip perorangan PNS	Jumlah file PNS yang terpelihara	8118 PNS	-	8118 PNS	8039 PNS	99	-	-	99
04	05	06	31	07	Pengembangan SIMPEG	Jumlah Aplikasi yang di kembangkan	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100	-	-	100
04	05	06	31	08	Penyusunan Formasi ASN	Jumlah dokumen penyusunan Formasi ASN yang tersusun	3 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100	-	-	100
04	05	06	31	09	Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian	Jumlah buku profil dan informasi kepegawaian	Buku profil 275, Duk 12, Bezeting 12	-	Buku profil 275, Duk 12, Bezeting 12	Buku profil 275, Duk 12, Bezeting 12	100	-	-	100
04	05	06	31	10	Pengadaan CPNS ASN	Jumlah CPNS yang di terima	162 orang	-	-	-	-	-	-	0

04	05	06	31	11	Rekonsiliasi Data ASN	Jumlah ASN yang terekonsiliasi datanya	8317 data	-	8317 data	8317 data	100	-	-	100
04	05	06	31	12	Pengadaan PPPK	Jumlah PPPK yang di terima dan di angkat	373 orang	-	-	-	-	-	-	0
04	05	06	32		Program Pengembangan ASN	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan lulus dengan predikat baik	93%	-	-	-	-	-	-	57%
04	05	06	32	01	Peningkatan kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi	180 ASN	-	-	-	-	180 ASN	43 ASN	23
04	05	06	32	02	Pelatihan Dasar / Prajabatan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dasar	460 CPNS	-	-	-	-	460 CPNS	60 CPNS	13
						Persentase kebutuhan ASN sesuai dengan Anjab dan ABK	85%	-	-	-	-	-	-	-
04	05	06	32	03	Perencanaan dan pengadaan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan / Formasi ASN	5 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen	0	0
						Persentase ASN yang mendapatkan tunjangan kinerja	95%	-	-	-	-	-	-	-
04	05	06	32	04	Pengembangan karier ASN	Jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan karier	5 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen	0	0
04	05	06	33		Program Penataan ASN	Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai syarat jabatan	84,75%	-	-	-	-	-	-	30,94%
04	05	06	33	01	Peningkatan pengelolaan administrasi Kepegawaian	Jumlah berkas Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pensiun dll) ASN yang di kelola	2150 berkas	-	-	-	-	2150 berkas	1145 berkas	53
04	05	06	33	02	Pelaksanaan Mutasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang di mutasi	730 ASN	-	-	-	-	730 ASN	449 ASN	61
04	05	06	34		Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian	Persentase peningkatan capaian penilaian prestasi kinerja ASN dengan nilai baik	99,04%	-	-	-	-	-	-	-
04	05	06	34	01	Peningkatan Kinerja ASN	Jumlah dokumen peningkatan kinerja ASN	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	0	0

04	05	06	34	02	Evaluasi Manajemen ASN	Indeks pelayanan kepegawaian	Baik	-	-	-	-	Baik	0	0
						Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	9%	-	-	-	-	-	-	-
04	05	06	34	03	Pembinaan ASN	Jumlah dokumen pembinaan ASN	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	0	0
						Persentase akurasi data kepegawaian	75%							48%
04	05	06	34	04	Pengelolaan Sistem Informasi Pegawai ASN	Jumlah aplikasi yang terkelola	6 aplikasi	-	-	-	-	6 aplikasi	6 aplikasi	100
04	05	06	34	05	Rekonsiliasi Data ASN	Jumlah data ASN yang telah di rekonsiliasi	8350 Data ASN	-	-	-	-	8350 Data ASN	4446 Data ASN	53
04	05	06	34	06	Pengelolaan dokumen kepegawaian ASN	Jumlah dokumen perorangan ASN yang dikelola	8350 Dokumen Kepegawaian	-	-	-	-	8350 Dokumen Kepegawaian	4356 dokumen kepegawaian	52

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

Melihat kondisi tersebut diatas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan program/kegiatan dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto hanya melaksanakan urusan pemerintah urusan penunjang, yang tidak menggunakan indikator rencana kerja pembangunan daerah seperti, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma Standar Pelayanan Kerja (NPSK). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto adalah Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan Indikator penunjang urusan pemerintahan daerah.

Sebagaimana dapat di uraikan pada Tabel TC-30

Tabel TC.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Rentsra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	Tahun 2019	Tahun 2020 (bulan Juni)	Tahun 2021	Tahun 2022	
				(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n+2)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Waktu penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	6 bulan	12 Bulan	-	-
2	Jumlah pemeliharaan / perpanjangan perizinan kendaraan dinas/operasional	n/a	n/a	6unit	6unit	6unit	-	6unit	0unit	6unit	-	-
3	Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	6 bulan	12 Bulan	-	-
4	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	6 bulan	12 Bulan	-	-
5	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	n/a	n/a	7 jenis	14 jenis	5 jenis	-	10 jenis	2 jenis	12 Bulan	-	-
6	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	6 bulan	12 Bulan	-	-

7	Jumlah waktu penyediaan perjalanan dinas yang dibutuhkan	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	6 bulan	12 Bulan	-	-
8	Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Kerja Yang dibutuhkan selama 12 bulan	n/a	n/a	6 Tenaga non PNS	6 Tenaga non PNS	6 Tenaga non PNS	-	6 Tenaga non PNS	6 Tenaga non PNS	6 Tenaga non PNS	-	-
9	Jumlah jenis meubel yang tersedia	n/a	n/a	4 set	-	4 set	-	-	0	-	-	0
10	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas operasional roda empat	n/a	n/a	1 Unit	-	1 Unit	-	-	0	-	-	0
11	Jumlah Pemeliharaan Gedung yang dilakukan	n/a	n/a	3 gedung	3 gedung	1 gedung	-	1 gedung	1 gedung	-	-	-
12	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilakukan	n/a	n/a	6 unit	6 unit	6 unit	-	6 unit	4 unit	-	-	-
13	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang dilakukan	n/a	n/a	6 jenis	6 jenis	6 jenis	-	6 jenis	4 jenis	-	-	-
14	Jumlah Pemeliharaan Gedung Balai Diklat yang dilakukan	n/a	n/a	-	3 gedung	-	-	-	-	-	-	-
15	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	n/a	n/a	38 stel	38 stel	-	-	38 stel	-	-	-	-
16	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja OPD yang dihasilkan	n/a	n/a	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	-	7 dokumen	5 dokumen	-	-	-
17	Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatannya	n/a	n/a	45 orang	45 orang	-	-	45 orang	-	-	-	-

18	Jumlah ASN yang mengikuti prajabatan	n/a	n/a	50 orang	175 orang	-	-	140 orang	-	-	-	-
19	Jumlah PNS yang mengikuti diklat sesuai dengan hasil analisa kebutuhan diklat	n/a	n/a	340 orang	550 orang	-	-	340 orang	-	-	-	-
20	Jumlah peserta diklat yang dikirim	n/a	n/a	60 orang	50 orang	-	-	43 orang	-	-	-	-
21	Jumlah ASN yang mengajukan ijin belajar	n/a	n/a	93 orang	100 orang	-	-	161 orang	-	-	-	-
22	Jumlah peserta yang ikut ujian dinas	n/a	n/a	-	14 orang	-	-	14 orang	-	-	-	-
23	Jumlah dokumen penyusunan formasi ASN yang tersusun	n/a	n/a	3 dokumen	3 dokumen	-	-	3 dokumen	-	-	-	-
24	Jumlah dokumen program pengembangan yang tersusun	n/a	n/a	56 OPD	1 dokumen	-	-	1 dokumen	-	-	-	-
25	Jumlah ASN yang di mutasi	n/a	n/a	175 PNS	715 PNS	-	-	976 PNS	-	-	-	-
26	Jumlah CPNS yang di terima	n/a	n/a	179 orang	136 orang	-	-	0	-	-	-	-
27	Jumlah Aplikasi yang terawat/terpelihara	n/a	n/a	1 aplikasi	1 aplikasi	-	-	1 aplikasi	-	-	-	-
28	Jumlah buku profil dan informasi kepegawaian	n/a	n/a	-	Buku,profil 275, DUK 12,	-	-	Buku,profil 275, DUK 12, Bezetting 12	-	-	-	-

					Bezetting 12							
29	Jumlah file perorangan PNS yang dikelola	n/a	n/a	100 %	8118 PNS	-	-	8039 PNS	-	-	-	-
30	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	n/a	n/a	1 aplikasi	1 aplikasi	-	-	1 aplikasi	-	-	-	-
31	Jumlah identitas pegawai yang diterbitkan	n/a	n/a	100 %	300 PNS	-	-	417 PNS	-	-	-	-
32	jumlah berkas kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pensiun, dll) ASN yang dikelola	n/a	n/a	2850 berkas	1755 berkas	2150 berkas	-	1894 berkas	1254 berkas	-	-	-
33	Jumlah PNS yang membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	n/a	n/a	100 %	8183 PNS	-	-	8183 PNS	-	-	-	-
34	Jumlah PNS yang menerima penganugerahan Satyalancana Karya Satya	n/a	n/a	400 orang	150 orang	-	-	142 orang	-	-	-	-
35	Jumlah PNS yang mengikuti general check up bagi pejabat struktural / PNS dan CPNS Sakit	n/a	n/a	230 orang	360 orang	-	-	360 orang	-	-	-	-
36	Nilai ASN yang lebih terukur dan memiliki kredibilitas dan realibilitas ketersediaan data	n/a	n/a	-	81	-	-	72,6	-	-	-	-
37	Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan	n/a	n/a	13 PNS	9 PNS	-	-	10 orang	-	-	-	-
38	Jumlah kasus rumah tangga PNS yang diselesaikan	n/a	n/a	18 orang	15 PNS	-	-	23 orang	-	-	-	-

39	Persentase tingkat kehadiran PNS	n/a	n/a	8318 PNS	84%	-	-	100%	-	-	-	-
40	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan Evaluasi Manajemen Kepegawaian	n/a	n/a	56 OPD	113 peserta	-	-	104 peserta	-	-	-	-
41	Jumlah PNS wajib lapor LP2P	n/a	n/a	6500 orang	6089 PNS	-	-	5676 PNS	-	-	-	-
42	Jumlah laporan LHKPN penyelenggara negara yang wajib lapor LHKPN dan LHKASN	n/a	n/a	500 orang	500 orang	-	-	115 orang	-	-	-	-
43	Jumlah dokumen Monitoring evaluasi dan pelaporan	n/a	n/a	18 OPD	1 dokumen	-	-	1 dokumen	-	-	-	-
44	Jumlah aplikasi dan jaringan Mesin Finger Print	n/a	n/a	150 node jaringan	1 Aplikasi (492 node jaringan)	-	-	1 Aplikasi (492 node jaringan)	-	-	-	-
45	Jumlah peserta yang ikut pembinaan	n/a	n/a	90 orang	120 peserta	-	-	120 orang	-	-	-	-
46	Jumlah PNS yang mengikuti sumpah	n/a	n/a	60 orang	179 orang	-	-	0	-	-	-	-
1	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	n/a	n/a	-	-	-	7 dok	-	-	-	7 dok	-
2	Jumlah laporan keuangan	n/a	n/a	-	-	-	4 lap	-	-	-	4 lap	-
3	Jumlah dokumen ketatausahaan kepegawaian	n/a	n/a	-	-	-	6 dok	-	-	-	6 dok	-

4	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi	n/a	n/a	-	-	180 ASN	-	-	43 ASN	-	-	-
5	Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan/ formasi ASN	n/a	n/a	-	-	5 Dokumen	-	-	0	-	-	-
6	Jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan karier	n/a	n/a	-	-	5 Dokumen	-	-	0	-	-	-
7	Jumlah ASN yang mengikuti latihan dasar/prajabatan	n/a	n/a	-	-	-	460 CPNS	-	60 CPNS	-	-	-
8	Jumlah berkas Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pensiun dll) ASN yang di kelola	n/a	n/a	-	-	-	2150 berkas	-	1254 berkas	-	-	-
9	Jumlah ASN yang di mutasi	n/a	n/a	-	-	-	730 ASN	-	449 ASN	-	-	-
10	Jumlah dokumen peningkatan kinerja ASN	n/a	n/a	-	-	-	2 Dokumen	-	0	-	-	-
11	Indeks pelayanan kepegawaian	n/a	n/a	-	-	-	baik	-	0	-	-	-
12	Jumlah dokumen pembinaan ASN	n/a	n/a	-	-	-	4 Dokumen	-	0	-	-	-
13	Jumlah aplikasi yang terkelola	n/a	n/a	-	-	-	6 aplikasi	-	6 aplikasi	-	-	-
14	Jumlah data ASN yang telah di rekonsiliasi	n/a	n/a	-	-	-	8350 data ASN	-	4446 data ASN	-	-	-
15	Jumlah dokumen perorangan ASN yang dikelola	n/a	n/a	-	-	-	8350 dokumen kepegawaian	-	4356 dokumen kepegawaian	-	-	-

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut:

- a. Belum selesainya dan belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan, Evaluasi Jabatan dan pola karier PNS;
- b. Belum optimalnya pendistribusian pegawai pada seluruh Perangkat Daerah;
- c. Masih terdapat PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan terlibat permasalahan hukum pidana;
- d. Masih rendahnya kompetensi aparatur PNS yang disebabkan pelaksanaan Diklat belum dapat menjangkau ke seluruh PNS;
- e. Masih adanya beberapa layanan administrasi kepegawaian yang belum tepat waktu;
- f. Masih belum optimalnya pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) On-Line.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Secara organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto bertugas memimpin, melakukan koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto. Kewenangan BKPP untuk melaksanakan fungsi tersebut meliputi :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tupoksi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Permasalahan Internal, hambatan :

- 1) Belum optimalnya pengembangan potensi SDM Aparatur BKPP;
- 2) Kurang optimalnya pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG On Line);
- 3) Kurang dapat maksimalnya layanan administrasi kepegawaian.

2. Faktor Permasalahan External, hambatan :

- 1) Masih rendahnya kesadaran PNS untuk melengkapi data kepegawaian perorangan;
- 2) Masih rendahnya disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- 3) Kurangnya pemahaman PNS terhadap peraturan kepegawaian.

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD 2016-2021 satu diantaranya yaitu keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Tantangan dan Permasalahan dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

- Tersedianya dana;
- Adanya Peraturan Perundangan-undangan di bidang kepegawaian:
 - a. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. Perda No. 12 Tahun 2008 tanggal 19 Nopember 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto;
 - e. Perbup. No. 66 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perbup No. 66 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto.
- Adanya Program Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto :
 - a. Program peningkatan disiplin aparatur;
 - b. Program pembinaan dan pengembangan aparatur;
 - c. Program peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan;
 - d. Program pembangunan dan pengembangan database melalui Sistem Informasi Kepegawaian On-Line.
- Situasi kerja yang kondusif :

Iklm kerja yang kondusif untuk pelaksanaan tugas

Tantangan dan permasalahan serta isu-isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi / catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mojokerto yaitu;

1. Mengoptimalkan Sinkronisasi dan Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah berkaitan Program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat mewujudkan

konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap perencanaan yang ada.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur perencana
3. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi yang ada
4. Koordinasi terpadu berbasis sistem dan komitmen perencanaan dalam kebersamaan
5. Efektifitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan secara lebih terstruktur dan terorganisir.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal P-RKPD

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan rancangan awal P-RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam pasal 17 dijelaskan bahwa Bappeda menyusun rancangan awal RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD.

Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik),

Tabel TC.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL P-RKPD TAHUN 2020
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama Perangkat Daerah : **BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

NO	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKPP Kab. Mojokerto	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	296.809.880	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKPP Kab. Mojokerto	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	296.809.880	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	56.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	56.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah pemeliharaan / perpanjangan perizinan kendaraan dinas/operasional	6 Unit	6.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah pemeliharaan / perpanjangan perizinan kendaraan dinas/operasional	6 Unit	6.750.000	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan	12 Bulan	27.562.500	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan	12 Bulan	27.562.500	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	36.562.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	36.562.500	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPP Kab. Mojokerto	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 jenis	36.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPP Kab. Mojokerto	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 jenis	36.000.000	

6	Penyediaan Makanan dan Minuman	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	12 Bulan	22.438.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	12 Bulan	22.438.000	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah waktu penyediaan perjalanan dinas yang dibutuhkan	12 Bulan	38.750.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah waktu penyediaan perjalanan dinas yang dibutuhkan	12 Bulan	38.750.000	
8	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Kerja Yang dibutuhkan selama 12 bulan	12 Bulan	72.746.880	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Kerja Yang dibutuhkan selama 12 bulan	12 Bulan	72.746.880	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BKPP Kab. Mojokerto	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	92%	596.217.900	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BKPP Kab. Mojokerto	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	92%	517.902.900	
1	Pengadaan Mebeleur	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah jenis meubel yang tersedia	4 set	20.000.000	Pengadaan Mebeleur	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah jenis meubel yang tersedia	4 set	20.000.000	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas operasional roda empat	1 unit	478.315.000	Pengadaan Kendaraan Dinas	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas operasional roda empat	1 unit	400.000.000	
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Pemeliharaan Gedung yang dilakukan	1 Gedung	31.302.900	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Pemeliharaan Gedung yang dilakukan	1 Gedung	31.302.900	
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilakukan	6 Unit	45.000.000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilakukan	6 Unit	45.000.000	
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang dilakukan	6 Jenis	21.600.000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang dilakukan	6 Jenis	21.600.000	
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BKPP Kab. Mojokerto	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja organisasi yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	100%	13.840.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BKPP Kab. Mojokerto	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja organisasi yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	100%	13.500.000	
1	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja OPD yang dihasilkan	7 Dokumen	13.840.000	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja OPD yang dihasilkan	7 Dokumen	13.500.000	

IV	Program Pengembangan ASN	Pem Kab. Mojokerto	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan lulus dengan predikat baik	93 %	1.778.021.400	Program Pengembangan ASN	Pem Kab. Mojokerto	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan lulus dengan predikat baik	93%	1.778.021.400	
1	Peningkatan Kompetensi ASN	Pem Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi	180 ASN	1.095.381.400	Peningkatan Kompetensi ASN	Pem Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi	140 ASN	1.095.381.400	
2	Pelatihan Dasar / Prajabatan ASN	BPSDM Prov Jatim	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dasar	460 CPNS	682.640.000	Pelatihan Dasar / Prajabatan ASN	Pemkab Mojokerto	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dasar	60 CPNS	682.640.000	
	Program Pengembangan ASN	Pem Kab. Mojokerto	Persentase kebutuhan ASN sesuai dengan Anjab dan ABK	85%	1.383.898.855	Program Pengembangan ASN	Pem Kab. Mojokerto	Persentase kebutuhan ASN sesuai dengan Anjab dan ABK	85%	1.379.968.855	
1	Perencanaan dan Pengadaan ASN	Pem Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan / Formasi ASN	5 dokumen	1.383.898.855	Perencanaan dan Pengadaan ASN	Pemkab Mojokerto	Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan / Formasi ASN	5 dokumen	1.379.968.855	
	Program Pengembangan ASN	Pem Kab. Mojokerto	Persentase ASN yang mendapatkan tunjangan kinerja	95%	162.000.000	Program Pengembangan ASN	Pem Kab. Mojokerto	Persentase ASN yang mendapatkan tunjangan kinerja	95%	158 631.275	
2	Pengembangan Karier ASN	Pem Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan karier	5 dokumen	162.000.000	Pengembangan Karir ASN	Pem Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan karier	5 dokumen	158 631.275	
V	Program Penataan ASN	Pem Kab. Mojokerto	Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai syarat jabatan	84,75%	420.832.579	Program Penataan ASN	Pem Kab. Mojokerto	Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai syarat jabatan	84,75%	418.945.280	
1	Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian	Pem Kab. Mojokerto	Jumlah berkas Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pensiun dll) ASN yang di kelola	2150 berkas	180.832.579	Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian	Pem Kab. Mojokerto	Jumlah berkas Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pensiun dll) ASN yang di kelola	2150 berkas	180.832.579	
2	Pelaksanaan mutasi jabatan ASN	Pem Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang di mutasi	730 ASN	240.000.000	Pelaksanaan mutasi jabatan ASN	Pemkab Mojokerto	Jumlah ASN yang di mutasi	730 ASN	238.112.701	
VI	Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian	Pem Kab. Mojokerto	Persentase peningkatan capaian penilaian prestasi kinerja ASN dengan nilai baik	99,04%	102.113.750	Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian	Pem Kab. Mojokerto	Persentase peningkatan capaian penilaian prestasi kinerja ASN dengan nilai baik	99,04%	102.113.750	
1	Peningkatan Kinerja ASN	Pem Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen peningkatan kinerja ASN	2 Dokumen	25.384.500	Peningkatan Kinerja ASN	Pem Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen peningkatan kinerja ASN	2 Dokumen	25.384.500	

2	Evaluasi Manajemen Kepegawaian	Pem Kab. Mojokerto	Indeks pelayanan kepegawaian	baik	76.729.250	Evaluasi Manajemen ASN	BKPP Kab. Mojokerto	Indeks pelayanan kepegawaian	baik	76.729.250	
	Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian	Pem Kab. Mojokerto	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	9%	619.587.500	Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian	Pem Kab. Mojokerto	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	9%	619.587.500	
1	Pembinaan ASN	Pem Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen pembinaan ASN	4 Dokumen	619.587.500	Pembinaan ASN	Pem Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen pembinaan ASN	4 Dokumen	619.587.500	
	Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian	BKPP Kab. Mojokerto	Persentase akurasi data kepegawaian	75%	339.793.000	Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian	BKPP Kab. Mojokerto	Persentase akurasi data kepegawaian	75%	339.793.000	
1	Pengelolaan Sistem Informasi Pegawai ASN	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah aplikasi yang dikelola	6 aplikasi	167.193.900	Pengelolaan Sistem Informasi Pegawai ASN	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah aplikasi yang dikelola	6 aplikasi	167.193.900	
2	Rekonsiliasi Data ASN	Pem Kab. Mojokerto	Jumlah data ASN yang telah di rekonsiliasi	8350 data	49.375.600	Rekonsiliasi Data ASN	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah data ASN yang telah di rekonsiliasi	8350 data	49.375.600	
3	Pengelolaan Dokumen Kepegawaian ASN	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen perorangan ASN yang dikelola	8350 dokumen kepegawaian	123.223.500	Pengelolaan Dokumentasi Kepegawaian ASN	BKPP Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen perorangan ASN yang dikelola	8350 dokumen kepegawaian	123.223.500	

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto merupakan Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kepegawaian dan tugas pembantuan sehingga dalam pelaksanaannya lebih kepada penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto yang juga selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pelayanan Kepegawaian, tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG, sehingga penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat secara langsung belum dapat dilaksanakan.

Dapat di uraikan sebagai berikut pada Tabel TC-32

Tabel TC.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN PAPBD TAHUN 2020
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama Perangkat Daerah : **BADAN KEPEGAWAIN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan dasar itu perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui mekanisme dan tahapan – tahapan perencanaan yaitu Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan oleh unsur penganggaran pemerintahan pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokero tahun 2020 adalah dokumen perencanaan yang substansi penyusunannya merupakan penjabaran Visi, Misi arah pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dan merupakan koridor dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi proyeksi sesuai kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang tatacara penyusunan rencana pembangunan nasional pasal 20 dan pasal 21 (pimpinan kementerian / lembaga menyusun rancangan renja KL dengan mengacu pada rancangan awal RKP dan berpedoman pada Renstra – KL serta pagu indikatif, maka dengan mengacu pada peraturan pemerintah tersebut tujuan, sasaran dan kegiatan pembangunan pada rencana kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto disinkronisasikan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kementrian / Kelembagaan. Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan nasional yang menyangkut arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto meliputi 3 (tiga) kementrian / Kelembagaan yaitu :

1. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementrian PAN – RB memiliki visi “**mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan Melayani**” dan misi “Penggerak Utama Reformasi Birokrasi”

Hal ini dicapai dengan tujuan strategis, yaitu :

- a. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. Terwujudnya sumberdaya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;
- d. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta akuntabel;
- e. Mewujudkan aparatur Kementrian PAN-RB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu :

- a. Penataan struktur birokrasi;
- b. Penataan jumlah, dan distribusi pegawai negeri sipil;
- c. Sistem seleksi calon pegawai negeri sipil dan promosi pegawai negeri sipil secara terbuka;
- d. Profesionalitas pegawai negeri sipil;
- e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah;
- f. Peningkatan pelayanan publik;
- g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur;
- h. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;

- i. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri sipil.

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementrian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto, yaitu program pengembangan ASN, program pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian dan program penataan ASN. Dimana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto melaksanakan penataan pegawai negeri sipil dan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi serta pengadaan ASN secara terbuka.

2. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemn kepegawaian negara. Visi yang ingin diwujudkan oleh BKN adalah ***“meneyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi”*** dimana Badan Kepegawaian Negara memiliki stretegi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melalui peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan sumberdaya manusia aparatur, dan pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dan pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur. Hal ini memberikan arah dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto. Program dan Kegiatan yang dimuat dalam Renja merupakan penjabaran dan tindak lanjut dalam Renstra dan Strategi Badan Kepegawaian Negara yaitu program pengembangan ASN dan program pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian.

3. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Lembaga Adminstrasi Negara adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembanga di bidang adminsitration negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.

Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah **“Menjadi Institusi yang Handal Dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Negara”**. Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dengan mengacu pada visi dan misi LAN diketahui bahwa program dan kegiatan program pengembangan ASN selaras dengan kebijakan Nasional yang ada pada Lembaga Administrasi Negara.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renja perubahan;
- 2) Menggambarkan arah renja organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renja perubahan.

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator

sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Pada tahun 2020 terdapat satu sasaran pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto yaitu :

- Meningkatkan profesionalisme ASN

Pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Perangkat Daerah (PD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Meningkatkan kemampuan SDM tentang Administrasi kepegawaian;
2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana BKPP;
3. Melaksanakan Mutasi dan Promosi yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas PNS;
4. Melaksanakan proses Kenaikan Pangkat PNS;
5. Melaksanakan proses SK Pensiun secara periodik;
6. Melaksanakan proses pelantikan Jabatan Struktural;
7. Melaksanakan proses seleksi terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
8. Melaksanakan proses SK pengangkatan PNS;
9. Melaksanakan proses Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah;
10. Melaksanakan pembinaan PNS secara periodik;
11. Melaksanakan analisis kebutuhan dan formasi PNS;
12. Menyelenggarakan dan Melaksanakan Diklat-diklat Aparatur;
13. Melaksanakan peningkatan dan pengembangan pelayanan dan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

3.3 Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah

a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Faktor untuk pencapaian visi, misi Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah;
2. Faktor pencapaian standar pelayanan tupoksi Perangkat Daerah;
3. Faktor Isu penyelenggaraan Tugas Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto;
4. Faktor Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto dan;
5. Faktor program dan kegiatan rutinitas/operasional Perangkat Daerah

b.Uraian Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto dalam periode tahun anggaran 2020 menetapkan program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dimana di tahun 2020 terdapat 2 (dua) kegiatan baru pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan sudah sesuai pada SIMDA Keuangan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, mencakup kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 6. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 7. Rapat-Rapat dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah; dan
 8. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didalamnya mencakup kegiatan:
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional;
 2. Pengadaan Mebeleur;
 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan didalamnya mencakup kegiatan:
 1. Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD
4. Program Pengembangan ASN didalamnya mencakup :
 1. Peningkatan Kompetensi ASN;
 2. Pelatihan Dasar/Prajabatan ASN;
 3. Perencanaan dan Pengadaan ASN;
 4. Pengembangan Karier ASN;
5. Program Penataan ASN :
 1. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
 2. Pelaksanaan Mutasi Jabatan ASN.
6. Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian, di dalamnya mencakup kegiatan :
 1. Peningkatan Kinerja ASN;
 2. Evaluasi Manajemen ASN;
 3. Pembinaan ASN;
 4. Pengelolaan Sistem Informasi Pegawai ASN;
 5. Rekonsiliasi Data ASN;
 6. Pengelolaan Dokumen Kepegawaian ASN.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 dapat di uraikan pada Tabel TC- 33

Tabel T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama SKPD : **BADAN KEPEGAWAIN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	UP	B/L				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						
4	05														
4	05	06													
4	05	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Waktu penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	BKPP Kab. Mojokerto	12 Bulan	60.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	-	-		
4	05	06	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pemeliharaan / perpanjangan perizinan kendaraan dinas/operasional	BKPP Kab. Mojokerto	6 Unit	7.500.000	APBD Kab. Mojokerto	-	-	-		

4	05	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan	BKPP Kab. Mojokerto	12 Bulan	40.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	-	-		
4	05	06	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKPP Kab. Mojokerto	12 Bulan	50.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	-	-		
4	05	06	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	BKPP Kab. Mojokerto	5 jenis	40.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	-	-		
4	05	06	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	BKPP Kab. Mojokerto	12 Bulan	33.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	-	-		
4	05	06	01	21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah waktu penyediaan perjalanan dinas yang dibutuhkan	BKPP Kab. Mojokerto	12 Bulan	75.500.000	APBD Kab. Mojokerto	-	-	-		
4	05	06	01	23	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Kerja Yang dibutuhkan selama 12 bulan	BKPP Kab. Mojokerto	12 Bulan	113.546.880	APBD Kab. Mojokerto	-	-	-		
4	05	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	BKPP Kab. Mojokerto	92%	643.315.000	APBD Kab. Mojokerto					
4	05	06	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas operasional roda empat	BKPP Kab. Mojokerto	1 unit	478.315.000	PAPBD Kab. Mojokerto	-	-	-		
4	05	06	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis meubel yang tersedia	BKPP Kab. Mojokerto	4 set	20.000.000	PAPBD Kab. Mojokerto	-	-	-		

4	05	06	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung yang dilakukan	BKPP Kab. Mojokerto	1 Gedung	61.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	-	-		
4	05	06	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilakukan	BKPP Kab. Mojokerto	6 Unit	60.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	-	-		
4	05	06	02	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang dilakukan	BKPP Kab. Mojokerto	6 Jenis	24.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	-	-		
4	05	06	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja organisasi yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	BKPP Kab. Mojokerto	100%	15.000.000	APBD Kab. Mojokerto			-		
4	05	06	06	05	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja OPD yang dihasilkan	BKPP Kab. Mojokerto	7 Dokumen	15.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	-	-		
4	05	06	01		Program Pelayanan Kesekretariatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Indikator Program BKPP yang tercapai	BKPP Kab. Mojokerto					100 %	617.046.880,00		
4	05	06	06	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran BKPP	Jumlah dokumen yang tersusun	BKPP Kab. Mojokerto	-	-	-	-	7 dok	15.000.000,00		B
4	05	06	06	0	Pengelolaan Administrasi Keuangan BKPP	Jumlah Laporan Keuangan	BKPP Kab. Mojokerto	-	-	-	-	4 lap	15.000.000,00		B
4	05	06	06	0	Ketatausahaan dan Kepegawaian BKPP	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	BKPP Kab. Mojokerto	-	-	-	-	6 dok	587.046.880,00		B

4	05	06	32		Program Pengembangan ASN	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan lulus dengan predikat baik		93%	5.300.000.000			94 %	8.796.300.000		
4	05	06	32	01	Peningkatan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi	Pemkab. Mojokerto	180ASN	1.800.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	180 ASN	2.752.550.000		
4	05	06	32	02	Pelatihan Dasar / Prajabatan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dasar / prajabatan	BPSDM Prov. Jatim	162 CPNS	3.500.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	174 CPNS	4.000.000.000		
					Program Pengembangan ASN	Persentase kebutuhan ASN sesuai dengan Anjab dan ABK		85%	1.435.000.000			87 %	1.728.000.000		
4	05	06	32	03	Perencanaan dan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan / Formasi ASN	Pemkab. Mojokerto	5 dokumen	1.435.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	5 dokumen	1.728.000.000		
					Program Pengembangan ASN	Persentase ASN yang mendapatkan tunjangan kinerja		95%	245.000.000			97%	315.750.000		
4	05	06	32	04	Pengembangan Karier ASN	Jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan karier	Pemkab. Mojokerto	5 dokumen	245.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	5 dokumen	315.750.000		
4	05	06	33		Program Penataan ASN	Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai syarat jabatan		84,75%	1.605.000.000			84,75%	1.749.450.000		
4	05	06	33	01	Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah berkas Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pensiun dll) ASN yang di kelola	BKPP Kab. Mojokerto	2150 berkas	450.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	2170 berkas	500.000.000		
4	05	06	33	02	Pelaksanaan mutasi jabatan ASN	Jumlah ASN yang di mutasi	Pemkab. Mojokerto	730 ASN	1.155.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	750 ASN	1.249.450.000		

4	05	06	34		Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian	Persentase peningkatan capaian penilaian prestasi kinerja ASN dengan nilai baik		99,04%	237.000.000			99,05%	253.000.000		
4	05	06	34	01	Peningkatan Kinerja ASN	Jumlah dokumen peningkatan kinerja ASN	BKPP Kab. Mojokerto	2 Dokumen	162.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	2 Dokumen	178.000.000		
4	05	06	34	02	Evalusi Manajemen ASN	Indeks pelayanan kepegawaian	BKPP Kab. Mojokerto	Baik	75.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	baik	75.000.000		
					Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN		9%	380.000.000			7 %	418.000.000		
4	05	06	34	03	Pembinaan ASN	Jumlah dokumen pembinaan ASN	Pemkab. Mojokerto	4 Dokumen	380.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	4 Dokumen	418.000.000		
					Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian	Persentase akurasi data kepegawaian		75%	609.000.000			78 %	670.000.000		
4	05	06	34	04	Pengelolaan Sistem Informasi Pegawai ASN	Jumlah aplikasi yang dikelola	BKPP Kab. Mojokerto	6 aplikasi	309.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	7 aplikasi	340.000.000		
4	05	06	34	05	Rekonsiliasi Data ASN	Jumlah data ASN yang telah di rekonsiliasi	BKPP Kab. Mojokerto	8350 data	100.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	8900 data	110.000.000		
4	05	06	34	06	Pengelolaan Dokumen Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen perorangan ASN yang dikelola	BKPP Kab. Mojokerto	8350 dokumen kepegawaian	200.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	8900 dokumen kepegawaian	220.000.000		

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Perangkat Daerah dalam mencapai diperkuat dengan penjelasan-penjelasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Demi mewujudkan rencana kerja pembangunan daerah. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah juga melakukan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

**MATRIK RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020**

No.	Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Rencana TA. 2020				Keterangan
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Kepegawaian	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pemenuhan Rekening telepon dan listrik yang terbayar	BKPP Kab. Mojokerto	12 bulan	56.000.000	APBD Kab.Mojokerto	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan / perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	BKPP Kab. Mojokerto	6 Unit	6.750.000	APBD Kab.Mojokerto	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis yang tersedia	BKPP Kab. Mojokerto	12 bulan	27.562.500	APBD Kab.Mojokerto	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang di butuhkan	BKPP Kab. Mojokerto	12 bulan	36.562.500	APBD Kab.Mojokerto	

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	BKPP Kab. Mojokerto	5 Jenis	36.000.000	APBD Kab.Mojokerto	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan mamin tamu dan rapat yang disediakan	BKPP Kab. Mojokerto	12 bulan	22.438.000	APBD Kab.Mojokerto	
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan dalam Daerah	Jumlah waktu pemenuhan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	BKPP Kab. Mojokerto	12 bulan	38.750.000	APBD Kab.Mojokerto	
			Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	Jumlah Penyediaan jasa dan tenaga kerja selama 12 bulan	BKPP Kab. Mojokerto	12 bulan	72.746.880	APBD Kab.Mojokerto	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis meubel yang tersedia	BKPP Kab. Mojokerto	4 set	20.000.000	PAPBD Kab.Mojokerto	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas operasional roda empat	BKPP Kab. Mojokerto	1 unit	400.000.000	PAPBD Kab.Mojokerto	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang di pelihara dan berfungsi baik	BKPP Kab. Mojokerto	1 gedung	31.302.900	APBD Kab.Mojokerto	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas / operasional yang di pelihara dan berfungsi baik	BKPP Kab. Mojokerto	6 unit	45.000.000	APBD Kab.Mojokerto	

			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	BKPP Kab. Mojokerto	6 Jenis	21.600.000	APBD Kab.Mojokerto	
		Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Yang Tersusun / Dibuat sesuai ketentuan yang berlaku	BKPP Kab. Mojokerto	7 Dokumen	13.500.000	APBD Kab.Mojokerto	
		Program Pengembangan ASN	Peningkatan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi	Pemkab. Mojokerto/ BPSDM Prov. Jatim	140 PNS	1.095.381.400	APBD Kab.Mojokerto	
			Pelatihan Dasar/Prajabatan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dasar/Parajabatan	Pemkab Mojokerto	60 CPNS	682.640.000	APBD Kab.Mojokerto	
			Perencanaan dan pengadaan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan / formasi ASN	BKPP Kab. Mojokerto	5 dokumen	1.379.968.855	PAPBD Kab.Mojokerto	
			Pengembangan karier ASN	Jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan karier	BKPP Kab. Mojokerto	5 dokumen	158.631.275	PAPBD Kab.Mojokerto	

		Program Penataan ASN	Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah berkas Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pensiun dll) ASN yang di kelola	BKPP Kab. Mojokerto	2150 berkas	180.832.579	APBD Kab.Mojokerto	
			Pelaksanaan mutasi jabatan ASN	Jumlah ASN yang di mutasi	Pemkab. Mojokerto	730 ASN	238.112.701	PAPBD Kab.Mojokerto	
		Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian	Peningkatan Kinerja ASN	Jumlah dokumen peningkatan kinerja ASN	BKPP Kab. Mojokerto	2 Dokumen	25.384.500	APBD Kab.Mojokerto	
			Evaluasi Manajemen ASN	Indeks pelayanan kepegawaian	Pemkab. Mojokerto	baik	76.729.250	APBD Kab.Mojokerto	
			Pembinaan ASN	Jumlah dokumen pembinaan ASN	BKPP Kab. Mojokerto	4 Dokumen	619.587.500	PAPBD Kab.Mojokerto	
			Pengelolaan Sistem Informasi Pegawai ASN	Jumlah aplikasi yang terkelola	BKPP Kab. Mojokerto	6 aplikasi	167.193.900	APBD Kab.Mojokerto	
			Rekonsiliasi Data ASN	Jumlah data ASN yang telah di rekonsiliasi	BKPP Kab. Mojokerto	8350 data	49.375.600	APBD Kab.Mojokerto	
			Pengelolaan Dokumen Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen perorangan ASN yang dikelola	BKPP Kab. Mojokerto	8350 dokumen kepegawaian	123.223.500	APBD Kab.Mojokerto	
		Jumlah					5.625.273.840		

BAB V PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, baik dalam kerangka regulasi atau mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategik (Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang Perangkat Daerah untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP PD) dalam rangka hal tersebut Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Badan/Instansi terkait, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

Mojokerto, 24 Agustus 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KAB. MOJOKERTO



Drs. Ec. SUSANTOSO, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620317 198603 1 014